Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi e-ISSN: 2549-4236, p-ISSN: 1411-8939
Lembaga Penellitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Vol 25, No 1 (2025): Februari, 455-459
DOI: 10.33087/jiubj.v25i1.5849

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Edwinsyah*, Munajat, Mardiah Kenamon, Yunita Sari
Magister Manajemen Program Pascasarjana, Universitas Baturaja
*Correspondence: edwinsyah64@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengelolaan barang milik daerah. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan regresi linear berganda untuk menganalisis secara kritis faktor yang diduga mempengaruhi kualitas pengelolaan barang milik daerah dilingkungan pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan dan pasrsial variabel kualitas aparatur, kepatuhan regulasi dan sistem informasi manajemen berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan barang milik daerah di pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu**.**

Kata Kunci: Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kualitas ASN, Sistem Informasi manajemen

Abstract. *This research aims to analyze the factors that influence the quality of management of regional property. The research uses quantitative descriptive methods using multiple linear regression to critically analyze factors that are thought to influence the quality of management of regional property within the Ogan Komering Ulu (OKU) Regency government environment. The results of this research show that simultaneously and partially the variables of apparatus quality, regulatory compliance and management information systems have a positive effect on the quality of management of regional property in the regional government of Ogan Komering Ulu Regency.*

Keywords: *Regional Property Management, ASN Quality, Management Information System*

PENDAHULUAN

Barang Milik Daerah yang berada dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak hanya yang dimiliki oleh pemerintah daerah saja, tetapi juga termasuk barang milik pihak lain yang dikuasai pemerintah daerah dalam rangka pelayanan ataupun pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pengelolaan barang milik daerah harus ditangani dengan baik agar barang milik daerah tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Namun jika tidak dikelola dengan semestinya, barang milik daerah tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari barang milik daerah membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu. (DPRD Provinsi Banten, 2023).

Lebih lanjut, Undang Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan secara eksplisit bahwa reformasi bidang keuangan negara/daerah mencakup reformasi dalam pengelolaan barang milik negara/daerah. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa Barang Milik Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan daerah, dan oleh karenanya diperlukan payung hukum yang mengatur pengelolaan barang milik daerah. Dalam hal ini, Peraturan Daerah (Perda) beserta peraturan pelaksanaannya merupakan payung hukum yang dimaksud. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengelolaan barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan APBD yang transparan, akuntabel dan auditabel sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten OKU menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Komitmen pimpinan sangat dibutuhkan untuk

pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah. Komitmen pimpinan digunakan sebagai variabel moderating karena dalam prakteknya, pimpinan OPD sering menomor duakan masalah pengelolaan barang milik daerah.

Penerapan sistem teknologi informasi memerlukan komitmen pimpinan agar menyediakan peralatan dari hardware, software, dan jaringan yang memadai untuk kelancaran proses penatausahaan barang milik daerah. Komitmen dari pimpinan diperlukan juga dalam pelaksanaan regulasi. Gusman (2012), sebagus apapun suatu peraturan disusun, tanpa adanya komitmen dari pimpinan untuk menerapkan peraturan tersebut maka peraturan tersebut tidak akan berhasil. Komunikasi dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah memerlukan komitmen pimpinan. Kepala OPD selaku pengguna barang milik daerah kurang memiliki komitmen dalam pengelolaan barang milik daerah. Hal ini dapat terlihat bahwa ada perbedaan data antara Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang dilaporkan oleh pengurus barang kepada pengelola barang milik daerah dengan data dari bagian keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya komunikasi yang baik dalam pengelolaan aset di OPD, yaitu antara pengurus barang, penyimpan barang, dan seksi akuntansi di bagian keuangan, karena laporan aset yang dibuat oleh ketiga petugas tersebut berbeda¬beda, masing-masing petugas membuat laporan sesuai dengan data yang diterimanya dan tidak ada pengecekan satu sama lain. Sebaliknya, jika kepala OPD mau berkomitmen dalam pengelolaan barang milik daerah, seharusnya bisa mengkordinasikan pengurus/penyimpan barang dan seksi akuntansi agar berkomunikasi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan laporan dengan cara rekonsiliasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengelolaan barang milik daerah pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus dimana semua populasi dijadikan sebagai sampel dimana total populasi sebanyak 47 OPD. Pegawai yang bekerja dalam pengelolaan barang milik daerah di Setiap OPD Kabupaten Ogan Komering Ulu. Jumlah OPD yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 47 OPD. Pada masing-masing OPD akan diberikan 1 (satu) kuesioner yang akan diisi oleh responden yakni Pengurus Barang Pengguna yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah di OPD tersebut. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data primer pada penelitian ini adalah mengunakan instrumen kuesioner yang diisi oleh pengurus barang OPD di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner ke sejumlah responden sedangkan Interview atau wawancara mendalam tidak peneliti lakukan dalam penelitian ini. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kuesioner. Jawaban responden diberi skor atau nilai berdasarkan skala likert, yang alternatif jawabannya terdiri dari yaitu (5) sangat setuju, (4) setuju, (3) netral, (2) tidak setuju, (1) sangat tidak setuju. Kuesioner yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Sugiyono, 2022).

Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*Purposive*) di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mengingat selama ini belum ada kajian/penelitian yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah. Peneliti membatasi ruang lingkup pembahasan pada Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Mengingat di Kementerian, Lembaga dan Daerah perlunya tata kelola pemerintahan yang baik dan salah satunya yakni pengelolaan barang milik daerah.

HASIL

Tabel 1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase (%)
Laki-laki	32	68,09
Perempuan	15	31,91
Total	47	100,00

Sumber : data olahan

Tabel 1 menjelaskan bahwa responden pada penelitian ini didominasi oleh laki-laki sebanyak 32 orang yang berarti 68,09% sementara sisanya sejumlah 15 orang atau 31,91% berjenis kelamin perempuan, sedangkan Tabel 2 diketahui bahwa jumlah responden didominasi oleh usia di atas 35 tahun dengan jumlah 30 orang atau setara 75% dan sisanya responden berusia antar 25 – 35 tahun berjumlah 17 orang atau 25% sedangkan tidak ada responden yang berusia kurang dari 25 tahun.

Tabel 2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Presentase (%)
< 25 tahun	0	0,00
25 – 35 tahun	17	25,00
>35 tahun	30	75,00
Total	47	100,00

Sumber : data olahan

Tabel 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja	Frekuensi	Presentase (%)
< 5 tahun	17	36,18
5 – 10 tahun	25	53,19
>10 tahun	5	10,63
Total	47	100,00

Sumber : data olahan

Tabel 3 dapat diketahui bahwa jumlah responden didominasi dengan masa kerja melampaui 10 tahun dengan jumlah 5 orang, setara dengan 10,63% selanjutnya diikuti oleh responden yang masa kerjanya di bawah 5 tahun yang berjumlah 17 responden, setara dengan 36,18% serta sisanya dengan masa kerja antara 5 – 10 tahun dengan jumlah 25orang, setara 53,19%. Tabel 4 dapat diketahui bahwa Pendidikan terakhir pada responden didominasi oleh Pendidikan S1 dengan jumlah 38 orang, setara 80,85% sementara sisanya S2 sejumlah 2 orang atau 4,25%, DIII dengan jumlah 5 orang atau sebesar 10,64%, SMA/Sederajat sejumlah 1 orang atau 2,13% dan lainnya sejumlah 1 orang atau sebesar 2,13%. Sedangkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa responden yang mengikuti kursus/bimtek/diklat didominasi oleh responden yang tidak pernah mengikuti kursus/bimtek/diklat dengan jumlah 2 orang atau sebesar 4,25% sedangkan kategori minim sekali sebesar 19 orang atau 40,43%, Sering sejumlah 24 orang atau 51,07% dan sangat sering sejumlah 2 orang atau 4,25%.

Tabel 4
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Frekuensi	Presentase (%)
SMA/Sederajat	1	2,13
DIII	5	10,64
S1	38	80,85
S2	2	4,25
Lainnya (Ners)	1	2,13
Total	47	100,00

Sumber : data olahan

Tabel 5
Karakteristik Responden Berdasarkan Kursus/Bimtek/Diklat

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Presentase (%)
Tidak Pernah	2	4,25
Minim Sekali	19	40,43
Sering	24	51,07
Sangat Sering	2	4,25
Total	47	100

Sumber : data olahan

Tabel 6
Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	9.913	4.246	
	Kualitas_aparatur	.608	.172	.408
	Kepatuhan_regulasi	.333	.145	.257
	Sistem_informasi_manajemen	.454	.133	.395

Sumber: data olahan

Tabel 6 mengenai analisis regresi linear berganda maka dapat disimpulkan persamaan regresi liner bergandanya sebagai berikut: Y = 9.913+0.608 X1 + 0.333 X2 + 0.454 X3 + e. Hasil dari persamaan regresi linear berganda menjelaskan bahwasannya: Nilai Konstanta 9,913 yang menunjukan keadaan apabila kualitas aparatur, kepatuhan regulasi, dan sistem informasi manajemen konstan (tetap), maka kualitas pengelolaan barang milik daerah adalah sebesar 9,913. koefisien regresi 0,608 menunjukan bahwa tiap terjadi pertambahan kualitas aparatur 1 satuan akan menciptakan peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah sebesar 0,608 dengan asumsi nilai variabel lainnya tidak berubah.

Koefisien regresi sebesar 0,333 menunjukan tiap terjadi pertambahan kepatuhan regulasi sebesar 1 satuan akan menciptakan peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah sebesar 0,333 dengan asumsi nilai variabel lainnya tidak berubah. Koefisien regresi 0,454 menunjukan tiap terjadi pertambahan sistem informasi manajemen sebesar 1 satuan dapat menyebabkan peningkatan kualitas pengelolaan barang milik daerah sebesar 0,454 dengan asumsi nilai variabel lainnya tidak berubah.

Tabel 7
Hasil Uji t

No	Hipotesis	t_{tabel}	t_{hitung}	Sig	*alpha*	Hasil Hipotesis
1	Kualitas Aparatur terhadap Kualitas Pengelolaan BMD (H1)	2,014	3,531	0,001	0,05	Hipotesis diterima
2	Kepatuhan Regulasi Ba-rang Milik Daerah terhadap Kualitas Penge-lolaan BMD (H2)	2,014	2,294	0,027	0,05	Hipotesis diterima
3	Pengaruh Sistem Informasi Ma-najemen terhadap Kualitas Penge-lolaan BMD (H3)	2,014	3,422	0,001	0,05	Hipotesis diterima

Sumber : data olahan

Tabel 7 didapatkan t-hitung pada variabel kualitas aparatur daerah sebesar 3,531. Kemudian, angka t-tabel 2,014; perbandingan keduanya yakni t-hitung > t-tabel dengan signifikansi 0,001 < 0,05. Temuan ini menguatkan teori stewardship, dimana ditegaskan pemerintah daerah yang menjadi institusi terpercaya memiliki kesanggupan memenuhi aspirasi masyarakat, berkemampuan melayani secara unggul kepada masyarakat, serta menghasilkan nilai positif dari tanggung jawabnya terkait pengelolaan BMD yang menjadi amanahnya. Tanggung jawab tersebut memastikan bahwa tujuan ekonomi tercapai dan kesejahteraan masyarakat terpenuhi secara optimal. Karena pengelolaan BMD yang efektif merupakan wujud pengelolaan keuangan optimal, maka pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan faktor pendukung seperti peningkatan kualitas aparatur daerah.

Hasil ini selaras temuan Astini (2018) yang menunjukan bahwa kualitas aparatur memengaruhi efektivitas manajemen aset. Agar mampu meningkatkan keuntungan melalui manajemen aset dibutuhkan pengelola dengan kemampuan yang mumpuni, serta wawasannya memadai. Hasil ini juga sesuai temuan Ricardo et al,. (2022) dimana menunjukkan bahwa pengelolaan BMD mendapat pengaruh dari kualitas pengelolanya. Aparatur daerah yang berkualitas dapat meningkatkan pengelolaan BMD.

Tabel 7 juga didapatkan t-hitung pada variabel kepatuhan regulasi sebesar 2,294; kemudian, angka t-tabel 2,014. Perbandingan keduanya yakni t-hitung > t-tabel dengan signifikansi 0,027 < 0,05. Temuan ini menerima hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh positif kepatuhan regulasi untuk kualitas pengelolaan BMD. Dengan demikian, kepatuhan regulasi mempengaruhi secara positif dan signifikan kualitas pengelolaan BMD di Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hal ini berarti semakin meningkatnya kepatuhan regulasi akan meningkatkan pula efektivitas pengelolaan BMD. Hal ini selaras temuan Ricardo et al,. (2022), yakni bahwa regulasi memengaruhi secara negatif serta signifikan untuk pengelolaan BMD. Artinya pengelolaan BMD mendapat pengaruh dari kepatuhan regulasi. Dengan demikian, untuk mencapai pengelolaan yang optimal aparatur harus merujuk pada regulasi serta aturan yang diberikan.

Selain itu, Tabel 7 didapatkan t-hitung pada variabel sistem informasi manajemen

sebesar 3,422. kemudian, angka t-tabel 2,014. Perbandingan keduanya yakni t-hitung > t-tabel dengan nilai signifikansi menunjukan angka sebesar 0,001 < 0,05. Hasil tersebut membuktikan bahwa sistem informasi manajemen memengaruhi secara positif dan signifikan kualitas pengelolaan BMD di pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hal ini mengindikasi bahwa sistem informasi manajemen dimanfaatkan secara efektif oleh OPD dalam mengelola barang milik daerah. Semakin baik sistemnya, semakin andal, akurat, dan terkini informasi yang digunakan dalam pengelolaan barang milik daerah. Semakin lengkap data barang milik daerah yang diidentifikasi atau dicatat dalam basis data, maka informasi yang diperoleh akan semakin lengkap dan bermakna. Semakin baik kemampuan validasi entri data sistem, semakin akurat informasi yang diperoleh. Ketika kualitas input validasi sistem meningkat, kualitas informasi keluaran sistem juga meningkat, yang mempengaruhi kualitas pengelolaan barang milik daerah oleh pengguna informasi.

Hal ini selaras dengan penelitian Yuliana (2021) yang menunjukan bahwa sistem informasi manajemen berpengaruh terhadap kualitas manajemen barang milik daerah. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Rahmadhani (2022) yang menunjukan bahwa SIMDA-BMD berpengaruh positif terhadap pengelolaan BMD agar penarikan informasi menjadi lebih cepat, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, perlu diciptakan suatu sistem informasi yang dapat menggantikan pekerjan manual menjadi pekerjaan yang dikerjakan secara elektronik yaitu dengan Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA-BMD).

SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa secara simultan dan pasrsial variabel kualitas aparatur, kepatuhan regulasi dan sistem informasi manajemen berpengaruh positif terhadap kualitas pengelolaan barang milik daerah di pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

DAFTAR PUSTAKA

Astini, Y. 2018. Kualitas Aparatur, Sistem Pengendalian Intern dan Efektivitas Manajemen Aset Tetap. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 13(2), 173–184.

DPRD Provinsi Banten. 2023. Laporan Akhir Kajian Optimalisasi Aset Provinsi Banten Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Banten.

Eka Yuliana, R., Taufik, T., & Nasrizal, N. (2021). Pengaruh Kualitas Aparatur, Regulasi, Sistem Informasi Manajemen, Sistem Pengendalian Intern Terhadap Efektivitas Manajemen Aset Tetap Di Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dengan Komitmen Pimpinan Sebagai Variabel Moderasi. Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 5(2), 215–225.

Gusman, I., & dkk. 2012. *Merajut Legislasi Merenda Keadilan Bagi Daerah. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.* Jakarta.

Rahmadhani, F., & Ariani, R. 2022. Kualitas Aparatur, SIMDA–BMD, Regulasi Dan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan BMD. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)*, 2(1), 291–301.

Ricardo, R., Trisna, W. V., & Astika, F. 2023. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (BLUD) Puskesmas Pada Pemerintah Kota Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 13(1), 117–125.

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D.* Alfabeta. Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.